

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

DAN DPMPSTP KABUPATEN

BLITAR

A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Blitar

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten yang terletak di Pulau Jawa bagian Timur. Wilayah ini merupakan salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/ kota yang terdapat di seluruh Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar berada di pesisir Samodra Indonesia dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri;
Sebelah Timur : Kabupaten Malang;
Sebelah Selatan : Samodera Indonesia; dan
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan pada
Posisi tengah Kabupaten Blitar ini berbatasan dengan
Kota Blitar.

Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa, yaitu terletak pada $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ Lintang Selatan.

Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian Utara dan wilayah Kabupaten Blitar Bagian Selatan. Kabupaten Blitar bagian Utara terbagi sebagian dataran rendah dan sebagian lain dataran tinggi. Ketinggian wilayah ini antara 105 - 309 meter dari permukaan air laut. Letak Kabupaten Blitar bagian utara dekat dengan Gunung Kelud yang merupakan gunung berapi yang masih aktif sehingga membuat struktur tanah Kabupaten Blitar lebih subut dan banyak dilalui sungai. Kecamatan yang wilayahnya di bagian utara meliputi: Kecamatan Kaligoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi dan Udanawu.

Kabupaten Blitar Bagian Selatan juga terbagi sebagian dataran rendah dan sebagian lain dataran tinggi dengan ketinggian antara 150 - 420 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir, dan pegunungan berbatu sehingga membuat struktur tanah yang kurang subut bila dibandingkan dengan Blitar bagian Utara. Kecamatan yang wilayahnya berada di bagian selatan meliputi: Kecamatan Bakung, Wonotirto,

Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan.

Hamparan wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 100 meter di atas permukaan air laut. Adapun distribusi wilayah menurut ketinggian yaitu:

1. Sebesar 36,4 persen kecamatan berada pada ketinggian antara 100 - < 200 meter di atas permukaan air laut;
2. Sebesar 36,4 persen kecamatan berada pada ketinggian antara 200 - < 300 meter di atas permukaan air laut; dan
3. Sebesar 27,2 persen kecamatan berada pada ketinggian > 300 meter di atas permukaan air laut.

Ada 6 (enam) wilayah kecamatan yang daerahnya berada pada ketinggian > 300 meter di atas permukaan air laut yaitu Kecamatan Wates, Wonotirto, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Panggungrejo. Wilayah Kecamatan Wates berada pada ketinggian tertinggi diantara 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu kurang lebih pada ketinggian 420 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Blitar berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, sehingga sama dengan wilayah lain di Indonesia yang memiliki perubahan musim sebanyak 2 jenis musim pada setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bulan Januari sampai dengan bulan Juni adalah musim penghujan dan musim kemarau biasanya pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan staf ahli di berbagai bidang. Selain itu Bupati juga dibantu oleh dinas/ instansi

daerah yang meliputi: Sekretariat Daerah dengan bagian-bagian ekonomi, pembangunan, hukum, humas dan protokol, kesejahteraan rakyat, layanan pengadaan, organisasi, pemerintahan, perlengkapan, dan umum, kemudian Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP, RSUD, 6 (enam) Badan, 19 (Sembilan belas) Dinas, dan 22 (dua puluh dua) Kecamatan.

Wilayah Kabupetan Blitar terbagi menjadi 22 wilayah kecamatan, 248 desa/ kelurahan (85 desa/ kelurahan di perkotaan dan 163 desa/ kelurahan di daerah pedesaan). Jumlah kelurahan seluruhnya 28 kelurahan (25 kelurahan di perkotaan dan 3 kelurahan di pedesaan), dan 220 desa (60 desa di perkotaan dan 148 desa di pedesaan). Jumlah dukuh/ lingkungan di Kabupaten Blitar mencapai 765 dukuh/ lingkungan. Jumlah Rukun Warga sebanyak 1.982 RW dan rukun tetangga sebanyak 7.046 RT.

2. Aspek Demografis

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pengembangan kependudukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sasaran tersebut tidak mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkan permasalahan kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran atau distribusi penduduk.

Berbagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah misalnya dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak awal tahun 1970 an. Pemerataan penyebaran penduduk telah dilakukan dengan cara memindahkan

penduduk Pulau Jawa keluar Pulau Jawa melalui program transmigrasi.

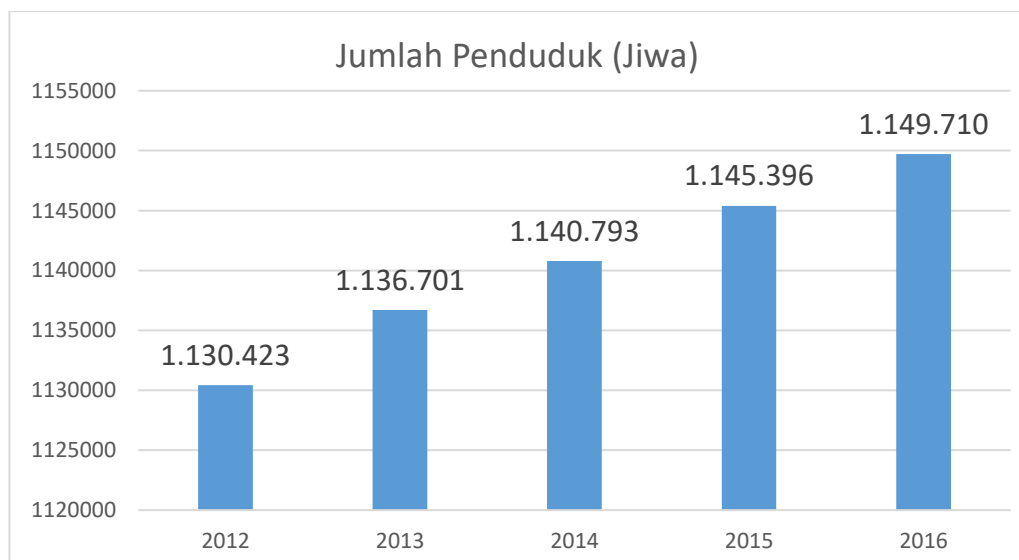
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar tahun 2000 adalah sebesar 1.064.643 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 1.116.639 jiwa termasuk penduduk tidak bertempat tinggal tetap. Penduduk Kabupaten Blitar tahun 2016 menurun hasil proyeksi Sensus Penduduk mencapai 1.149.710 jiwa terdiri dari 575.877 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 573.833 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian sex ratio di Kabupaten Blitar mencapai 100,36 yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada sebanyak 100 – 101 jiwa penduduk laki-laki.

Komposisi penyebaran penduduk di masing-masing wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Blitar memperlihatkan bahwa Kecamatan Ponggok berpenduduk paling banyak diantara 22 wilayah kecamatan yang ada, yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 101.793 jiwa. Adapun bila melihat kepadatan penduduk masing-masing wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Blitar menunjukkan wilayah terpadat adalah wilayah Kecamatan Sanankulon dengan kepadatan penduduk sebesar 1.686 jiwa/ km².

Lebih dari 7 ribu orang jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja mencapai 6.905 orang dimana sebanyak 4.280 orang adalah perempuan. Jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya kurang lebih untuk 5.039 orang. Dari jumlah pencari kerja yang sudah mendapatkan

penempatan sebanyak 3.792 orang dan dari sejumlah lowongan kerja yang ada 1.093 diantaranya telah dihapus sehingga sisa lowongan kerja sampai akhir 2016 hanya sebanyak 170.

Jumlah penduduk sepanjang tahun 2012 – 2016 terus menerus meningkat yaitu dari sebanyak 1.130.423 jiwa pada tahun 2012 meningkat menjadi sebanyak 1.149.719 jiwa pada tahun 2016. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk itu maka tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan pada kurun waktu yang sama yaitu dari sebesar 711 jiwa/ km² pada tahun 2012 meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar 724 jiwa/ km² pada tahun 2016. Sex ratio pada tahun 2012 mencapai 100,17 dan sempat menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 100,09 sebelum kemudian meningkat pada tahun 2014 sampai 2016 menjadi masing-masing sebesar 100,32; 100,35; dan 100,36.



Gambar 2.1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2012 – 2016
(Jiwa)

3. Aspek Ekonomis

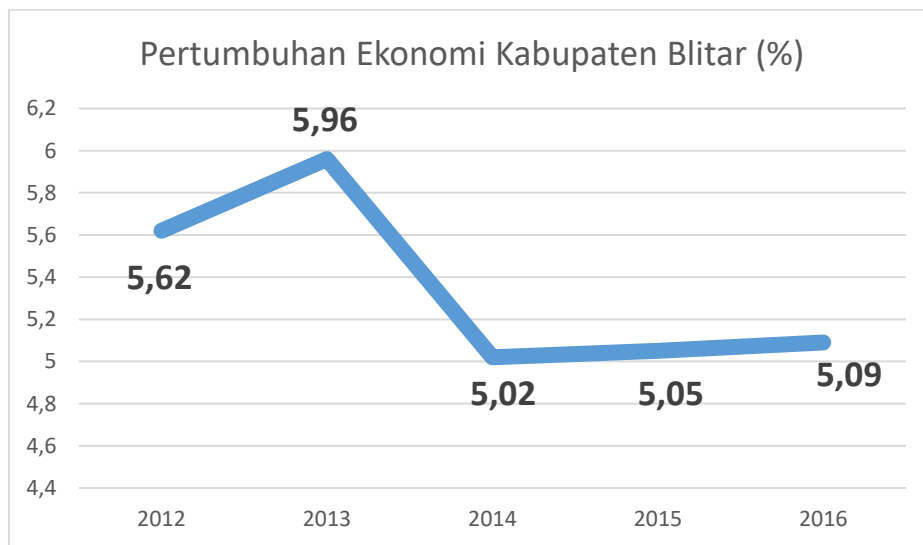
Struktur ekonomi Kabupaten Blitar didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sector Industri Pengolahan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,63 persen pada tahun 2016. Sektor Konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Blitar, sementara sector-sector yang lain kontribusinya di bawah 5 (lima) persen.

Pada tahun 2016, sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 35,31 persen terhadap PDRB Kabupaten Blitar, sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sebesar 36,05 persen. Struktur terbesar PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didominasi oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dan Perikanan yaitu masing-masing sebesar 29,48 persen dan 4,83 persen, sub kategori lainnya memberikan kontribusi di bawah 2 persen.

Kontribusi sector Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 17,06 persen dan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 17,20 persen. Pada tahun 2014 kontribusi sector ini menurun menjadi sebesar 16,73 persen dan meningkat pada tahun 2015 – 2016 masing-masing menjadi sebesar 16,96 persen dan 17,44 persen. Fluktuasi yang terjadi pada kontribusi sector ini sejalan dengan produksi barang domestic dan impor.

Kontribusi sector Industri Pengolahan pada tahun 2012 mencapai 12,95 persen dan menurun selama tahun

2013 dan 2014 masing-masing menjadi 12,82 persen dan 12,75 persen, sebelum kemudian meningkat kontribusinya pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing mencapai sebesar 12,83 persen dan 12,88 persen. Sementara sector Konstruksi ada kecenderungan meningkat kontribusinya yaitu dari sebesar 8,89 persen di tahun 2012 meningkat sampai menjadi 9,23 persen pada tahun 2016.



Gambar 2.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar
Tahun 2012 – 2015 (Persen)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2016 mencapai 5,09 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sebesar 5,05 persen. Banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar baik secara internal maupun factor eksternal. Dari sisi eksternal antara lain kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa factor yang ikut mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar adalah laju inflasi yang berhasil ditekan pada level 4,25 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,59 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 8,25 persen, diikuti Lapangan Usaha Penyediaan AKomodasi dan Makan Minum mencapai sebesar 7,30 persen, dan sector Perdagangan Besar dan Ecerah Reparasi Mobil dan Motor mencapai 6,23 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai contributor terbesar perekonomian Kabupaten Blitar hanya tumbuh sebesar 3,21 persen pada tahun 2016.

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tugas yang dimiliki Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi-fungsi Kepala Dinas sebagai representasi kelembagaan DPMPTSP meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Memvalidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Memimpin pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Memimpin pembinaan penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Memimpin pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

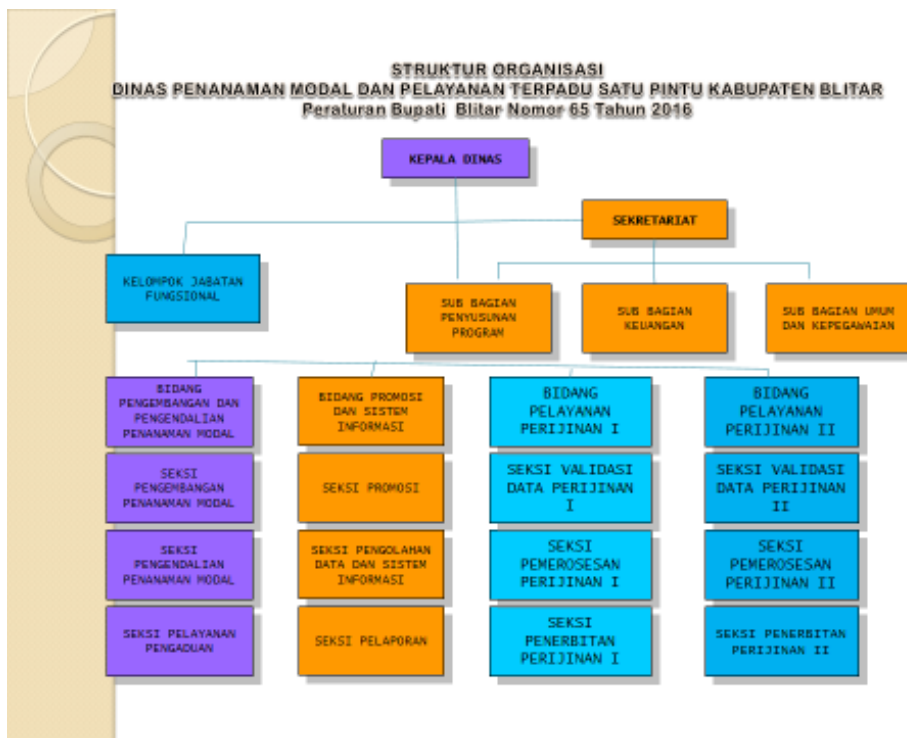
2. Organisasi DPMPTSP Kabupaten Blitar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mana dalam menjalankan tugasnya

dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Struktur organisasi dan tata kerja DPMPTSP Kabupaten Blitar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.

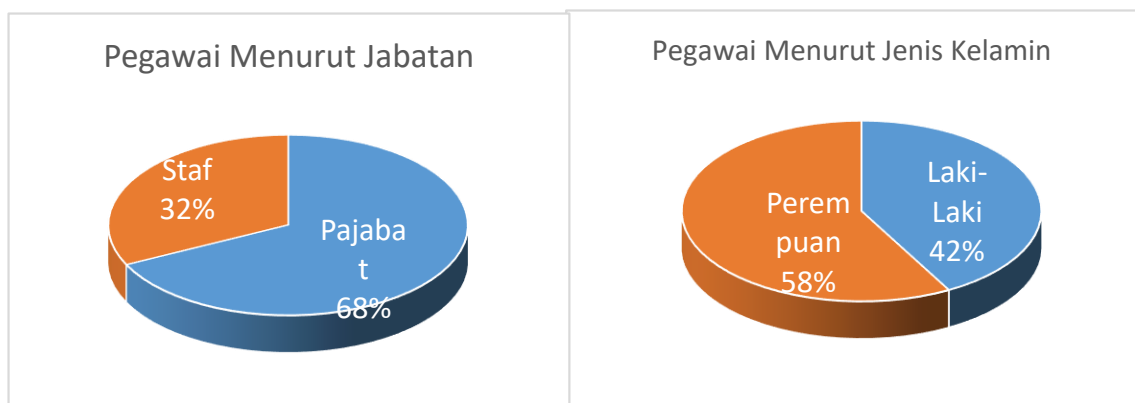
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Blitar

Adapun bidang-bidang yang ada pada organisasi DPMPTSP terdiri:

1. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, dipimpin seorang kepala bidang yang membawahi seksi-seksi:
 - a. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan

- b. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
 2. Bidang Promosi dan Sistem Informasi, dipimpin seorang kepala bidang yang membawahi seksi-seksi:
 - a. Seksi Promosi; dan
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
 3. Bidang Pelayanan Perijinan I, dipimpin seorang kepala bidang yang membawahi seksi-seksi:
 - a. Seksi Validasi Data Perijinan I, dan
 - b. Seksi Pemrosesan Perijinan I.
 4. Bidang Pelayanan Perijinan II, dipimpin seorang kepala bidang yang membawahi seksi-seksi:
 - a. Seksi Validasi Data Perijinan II; dan
 - b. Seksi Pemrosesan Perijinan II.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Dukungan Sumberdaya Manusia DPMPTSP

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Blitar didukung dengan SDM sejumlah 31 pegawai yang terdiri dari 21 pejabat struktural atau sebesar 68 persen dan 10 staf atau sebesar 32 persen.

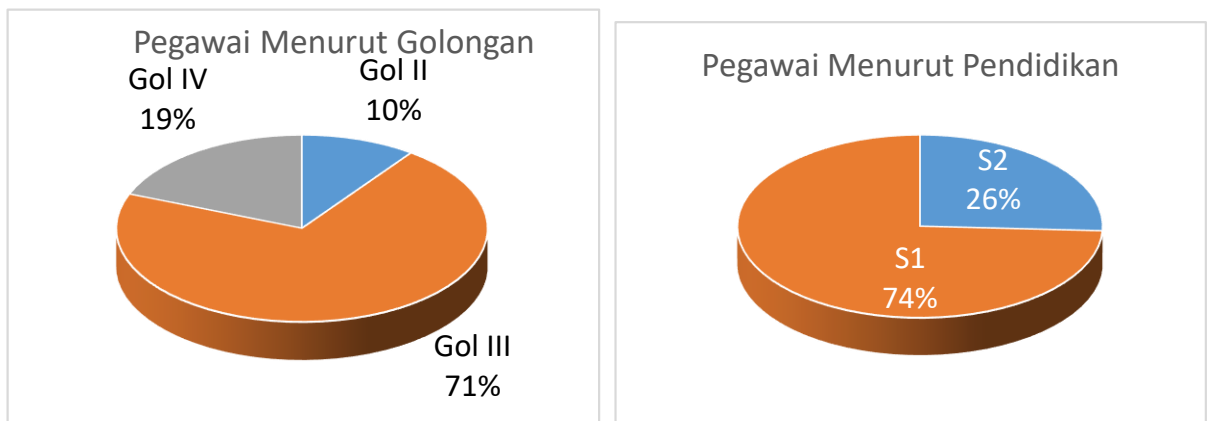


Gambar 2.4.

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Blitar Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai perempuan sebanyak 18 orang atau sebesar 58 persen dan selebihnya pegawai laki-laki yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 42 persen.

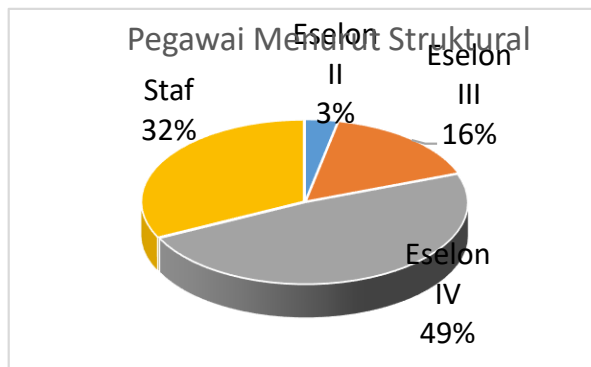
Sebagian besar pegawai di DPMPTSP Kabupaten Blitar memiliki golongan III yaitu sebesar 71 persen dan kemudian golongan IV sebesar 19 persen dan selebihnya yaitu sebanyak 10 persen pegawai golongan II.



Gambar 2.5.

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Blitar Menurut Golongan dan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar sudah berpendidikan S-1 yaitu kurang lebih sebesar 74 persen dan selebihnya sudah meraih jenjang S-2 atau sebesar 26 persen.



Gambar 2.6.

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Blitar Menurut Eselon

4. Arsitektur Kinerja DPMPTSP

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap daerah harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dalam jangka menengah 5 (lima) tahun yang senantiasa mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena pada hakekatnya RPJMD merupakan visi dan misi serta arah pembangunan kepala daerah terpilih, sehingga sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah, Renstra-OPD harus memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD rentang waktu yang bersamaan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 menegaskan bahwa visi Kabupaten Blitar selama tahun 2016 – 2021 adalah: ***Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing***. Terkait dengan organisasi perangkat daerah DPMPTSP, visi daerah Kabupaten Blitar itu dilaksanakan dengan Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing. Adapun tujuan RPJMD berkaitan dengan Misi ke 5 itu adalah: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Sesuai dengan tujuan tersebut, salah satu sasaran RPJMD adalah “Meningkatnya Pelayanan Perijinan” dengan OPD penanggung jawab utama adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar.

DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam Rencana Strategisnya tahun 2016 – 2021 dengan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan: Mewujudkan pelayanan perijinan dan peningkatan investasi

yang optimal. Tujuan ini memiliki 2 (dua) indicator, yaitu: (i) Predikat IKM pelayanan perijinan; (ii) Pertumbuhan Realisasi Investasi. Untuk mencapai tujuan itu, disusun 3 (tiga) sasaran DPMPTSP dengan masing-masing indikatornya yaitu:

1. Meningkatnya pemrosesan perijinan yang tepat waktu dengan indicator Pertumbuhan pemrosesan perijinan tepat waktu.
2. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Blitar dengan indicator Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar.

Sasaran DPMPTSP itu dicapai dengan 4 (empat) program dengan indicator masing-masing adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I dengan indicator % pelayanan perijinan Bidang I yang tepat waktu;
2. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II dengan indicator % pelayanan perijinan bidang II yang tepat waktu.
3. Program Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal dengan indicator % ijin penanaman modal yang terealisasi.
4. Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi dengan indicator % ijin prinsip terhadap investor yang terpromosi.
5. Meningkatnya permohonan ijin prinsip di Kabupaten Blitar dengan indicator Pertumbuhan permohonan ijin prinsip di Kabupaten Blitar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal daerah

itu DPMPTSP Kabupaten Blitar memiliki Rencana Aksi Tahun 2018 yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur DPMPTSP melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan Pelatihan (Diklat);
2. Pelaksanaan Promosi Investasi dengan Tujuan Menjaring Calon Investor untuk Berinvestasi usaha di Kabupaten Blitar;
3. Pengukuran Kepuasan Masyarakat Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan.
4. Pelaksanaan *Gathering* (agenda pertemuan calon investor) sebagai daya ungkit pertumbuhan realisasi percepatan penanaman modal;
5. Pengembangan aplikasi perijinan online.
6. Sosialisasi Perijinan melalui ragam media dan pameran.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan sebagai alat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dengan implementasi SOP pada masing-masing organisasi perangkat daerah, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah serta untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota ditegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. SOP Administratif merupakan standar operasional prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Sedangkan SOP teknis adalah standar operasional prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.